



**EFISIENSI HARUS JADI PENDORONG KEMANDIRIAN DAERAH**  
**Haryanto Soroti Optimalisasi Aset untuk Dongkrak PAD**

YOGYA (KR) - Anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, Haryanto SE, menyatakan bahwa efisiensi anggaran yang saat ini dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta harus dijadikan momentum penting untuk berbenah. Terutama dalam hal optimalisasi aset daerah.

Komisi A, yang memiliki fungsi membidangi persoalan aset sebagai bagian dari urusan pemerintahan daerah, menyoroti serius pentingnya pemanfaatan aset Pemkot secara maksimal. Menurut Haryanto, optimalisasi aset ini mutlak diperlukan guna memberikan sumbangsih signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Dengan adanya efisiensi, kemandirian fiskal menjadi hal yang tidak bisa ditawar lagi bagi daerah. Mau tidak mau, PAD harus menjadi fokus garapan utama," tegasnya, Kamis (6/11).

Namun, politisi PDI Perjuangan ini juga menekankan bahwa peningkatan PAD tidak boleh dilakukan dengan cara menaikkan pajak atau retribusi daerah, karena hal tersebut justru akan membebani masyarakat. Sebaliknya, Haryanto melihat optimalisasi aset. Pemkot sebagai lahan baru yang potensial dalam meningkatkan sektor pendapatan.

Dirinya mencontohkan, saat ini masih banyak aset Pemkot yang dinilai belum mampu dikelola secara maksimal, seperti lahan kosong, gedung mangkrak, hingga kios-kios di pasar yang terbengkalai. "Optimalisasi aset-aset yang belum



KR-Archdi Wahdan  
**Haryanto SE.**

termanfaatkan secara maksimal ini harus segera didorong. Ini adalah sumber pendapatan yang bisa kita gali tanpa perlu membebani warga dengan kenaikan pajak," landasnya.

Dalam optimalisasi aset tersebut, imbuhnya, Pemkot tidak harus bekerja sendiri melainkan dapat membangun kerja sama dengan pihak swasta. Misalnya pengelolaan lahan kosong di tempat strategis tentu akan menarik minat swasta dalam menjalankan usaha. Apalagi setiap jengkal di Kota Yogya memiliki nilai untuk dikembangkan secara komersil maupun profesional. Dengan model kerja sama tersebut maka Pemkot tidak semata mengandalkan sewa lahan melainkan juga profit dengan sistem bagi hasil. Di sisi lain, Komisi A juga tengah mengkaji kebutuhan regulasi guna mendukung upaya itu.

Oleh karena itu, dari sisi pendataan aset, menurut Haryanto menjadi kunci utama dalam rencana pengembangan ke depan. Menurutnya, tidak sedikit aset Pemkot yang tersebar di tiap kemandren.

(Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Juni 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005